

**KEWAJIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN
KAWASAN PASAR MBONGAWANI ENDE DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN
UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

**EMILLIANO RAYMUNDUS BANGGO
NIM: 2019 110 774**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWAJIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN
KAWASAN PASAR MBONGAWANI ENDE DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN
UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH

EMILLIANO RAYMUNDUS BANGGO
2019 110 774

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

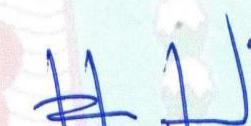
DISETUJUI :

Pembimbing I



Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc
NIDN : 0804116801

Pembimbing II



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

MENGETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum dan
Sosial Humaniora
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Flores



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

KEWAJIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN KAWASAN PASAR MBONGAWANI ENDE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 15 Agustus 2024

DISUSUN OLEH

EMILLIANO RAYMUNDUS BANGGO
2019 110 774

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | | |
|--|--------------|------------|
| 1. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Ketua) | 1.....
 |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.....
 |
| 3. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Anggota) | 3.....
 |
| 4. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.....
 |
| 5. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc | (Anggota) | 5.....
 |

Mengetahui



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emilliano Raymundus Banggo
Nim : 2019110744
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ENDE TENGAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, 4 September 2024
Penulis



Emilliano Raymundus Banggo

MOTTO

**“Bukan Untuk Kami, Ya Tuhan, Bukan Untuk Kami,
Tetapi Untuk Nama-Mu Berikanlah Kemuliaan.”**

(Emilliano Raymundus Banggo)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesederhanaan dan ketulusan hati pada setiap tetesan kasih sepanjang perjalanan menuju kesuksesan, saya persembahan tulisan ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, pengasih dan penyayang yang telah menyertai dan mendampingi peneliti sejak awal perkuliahan hingga hari ini.
2. Yang tercinta Bapak Damianus Banggo dan Ibu Yasinta Miri yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dengan penuh kasih sayang, serta selalu sabar dan tulus hati mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi untuk keberhasilan peneliti.
3. Yang tercinta Kakak Maria Serlina Banggo dan Adik Viktorianus Jesen Banggo yang selalu mendukung dan menanti keberhasilan penulis.
4. Yang tercinta Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.
5. Almamater Tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan petunjuk-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Penegakan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Kecamatan Ende Tengah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat”.**

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora pada Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, dengan berbekal ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakinan, maka tulisan inipun dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou,Akt selaku ketua yayasan perguruan tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr.Willybrordus Lanamana,S.E.,MMA Selaku rektor Universitas Flores bersama sekretaris Eksekutif dan para wakil rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora beserta wakil dekan dan jajarannya.
4. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc Selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Almh.Ibu Christiana Sri Murni, S.H.,M.H. sebagai dosen Pembimbing Akademik, yang juga selalu memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melakukan studi di Universitas Flores.

Ende, 4 September 2024

Penulis

ABSTRAK

KEWAJIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN KAWASAN PASAR MBONGAWANI ENDE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tujuan Penelitian ini: 1. Tujuan Umum :Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan memperdalam hukum Administrasi pada umumnya.2. Tujuan Khusus. a)Untuk mengetahui kewajiban satuan polisi pamong praja dalam menertibkan kawasan pasar Mbongawani Ende di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. b)Untuk mengetahui faktor yang menghambat satuan polisi pamong praja dalam menertibkan kawasan pasar Mbonggawani, Kabupaten Ende.

Lokasi penelitian adalah di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data agar lebih akurat dilakukan Studi Lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan dan telah dibahas maka peneliti menyimpulkan bahwa penertiban kawasan pasar Mbongawani Kabupaten Ende telah sesuai dengan kewenangan bedasarkan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Kewajiban, Penertiban, Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRACT

THE OBLIGATIONS OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN ORDERING THE MBONGAWANI ENDE MARKET AREA ARE REVIEWED FROM ENDE DISTRICT REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2023 CONCERNING PUBLIC ORDER, COMMUNITY TRANQUILITY AND COMMUNITY PROTECTION

Objectives of this Research: 1. General Objectives: The general purpose of this research is to study and deepen Administrative law in general.2. Special Purpose. a) To find out the obligations of the civil police unit in ordering the Mbongawani Ende market area, reviewed from Ende Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning public order, public peace and community protection. b) To find out the factors that hinder the Pamong Praja police unit in ordering the Mbonggawani market area, Ende Regency. The location of the research is at the Office of the Industry and Trade Office of Ende Regency and the Ende Regency Civil Service Police Unit. The type of research used in this research is empirical research. The approach method used is the Sociological Juridical approach. Field studies are used to collect data to make it more accurate.

Based on the results of the research and discussion that have been described and discussed, the researcher concludes that the control of the Mbongawani market area in Ende Regency is in accordance with the authority based on Regional Regulations.

Keywords: Obligations, Order, Market, Civil Service Police Unit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Ruang Lingkup Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Kewajiban	11
2.2 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	12

2.3 Peran Satuan Polisi Pamong Praja	14
2.4 Pengertian Peraturan Daerah.....	16
2.5 Pengertian Pasar	21
2.6 Pengertian Penertiban	28
2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum,Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.....	29
BAB III KEWAJIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN KAWASAN PASAR MBONGAWANI ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	31
3.1 Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.....	35
3.2 Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	37
BAB IV FAKTOR YANG MENGHAMBAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN KAWASAN PASAR MBONGAWANI, KABUPATEN ENDE.....	41
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN DOKUMENTASI	